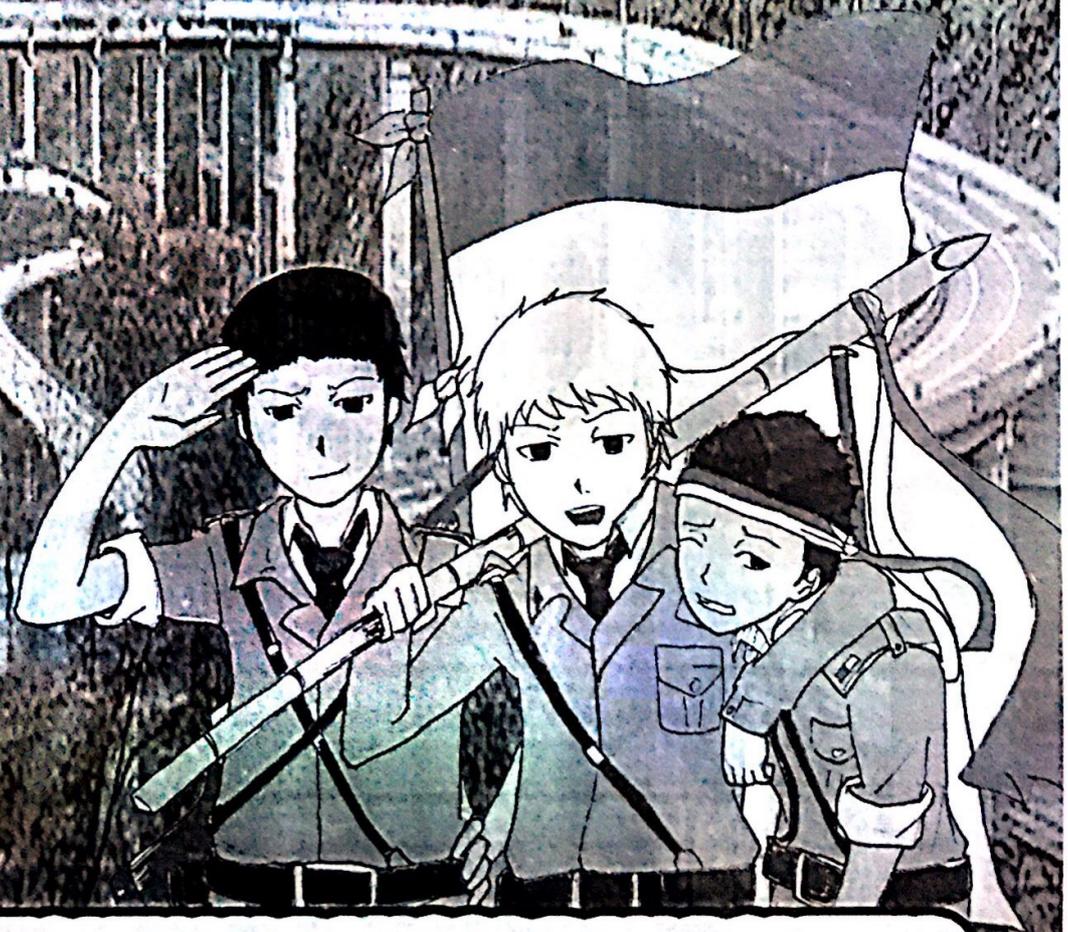




Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan berbasis akrual, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019, merupakan Pertanggung Jawaban yang dananya bersumber dari DPA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabuapten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019, memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan berbasis Akrual, sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggung jawaban dan tranparansi pengelolaan keuangan.

Payakumbuh, Februari 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



HERMAN AZMAR AP, M.Si

NIP. 19730913 199311 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan berbasis Akrual tersebut disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan Anggaran, posisi Keuangan, dan catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Payakumbuh, Februari 2020
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



HERMAN AEMAR, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar Isi	iii
LRA Versi 13	v
LRA Versi 64.....	vi
NERACA.....	vii
Info Aktual.....	viii
Laporan Operasional.....	ix
Laporan Perubahan Ekuitas.....	x
N E R A C A.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD	
2.1 Ekonomi Makro.....	5
2.2 Kebijakan Keuangan.....	5
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	7
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	8
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1 Entitas Akuntansi.....	10
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	12

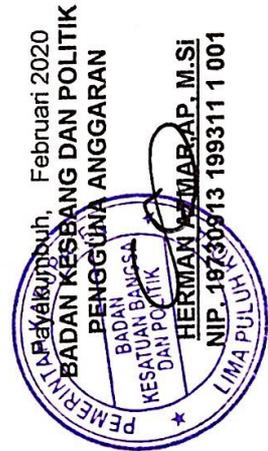
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
5.1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.....	14
5.2	Neraca.....	16
5.3	Laporan Operasional.....	18
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas.....	23
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN	
A.	Kedudukan.....	24
B.	Struktur Organisasi.....	24
BAB VI	PENUTUP	25

LAMPIRAN

- Lampiran A : Sisa UYHD
- Lampiran B : Rekapitulasi Inventaris Per 31 Desember 2019
- Lampiran C : Rincian Belanja Modal Tahun 2019
- Lampiran D : Daftar Persediaan
- Lampiran E : Daftar Hutang Jangka Pendek
- Lampiran F : Rekap SP2D
- Lampiran G : Rekap Pajak
- Lampiran H : SPJ Fungsional
- Lampiran I : Simda BMD

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Permendagri 64/2013)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.1	Pajak Daerah-LRA				
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA				
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
4.1.4	Lain-lain PAD yang Syah				
	JUMLAH PAD				
		4,662,510,892.00	4,408,998,061.00	94.56	4,080,095,667.00
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	4,567,010,892.00	4,318,978,661.00	94.57	4,067,545,667.00
5.1.1	Belanja Pegawai	2,424,845,608.00		98.35	2,055,615,859.00
5.1.2	Belanja Barang	2,101,403,560.00	1,894,133,053.00	90.14	2,011,929,808.00
5.1.5	Belanja Hibah			-	
5.1.6	Bantuan Sosial			-	
	Jumlah Belanja Operasi	4,567,010,892.00	4,318,978,661.00	94.57	4,067,545,667.00
		95,500,000.00	90,019,400.00	94.26	12,550,000.00
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.1	Belanja Tanah	95,500,000.00	90,019,400.00	94.26	12,550,000.00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal	95,500,000.00	90,019,400.00	94.26	12,550,000.00
	JUMLAH BELANJA	4,662,510,892.00	4,408,998,061.00	94.56	4,080,095,667.00
C	SURPLUS/ (DEFISIT)	(4,662,510,892.00)	(4,408,998,061.00)	94.56	(4,080,095,667.00)



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

NO	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Lebih/ Kurang	%
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
4.1.1	Pajak Daerah					
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah					
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
4.1.4	Lain-lain PAD yang Syah					
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	-
5	BELANJA	4,662,510,892.00	4,408,998,061.00	94.56	253,512,831.00	5.44
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,410,487,332.00	2,372,467,608.00	98.42	38,019,724.00	1.58
5.1.1	Belanja Pegawai	2,410,487,332.00	2,372,467,608.00	98.42	38,019,724.00	1.58
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	2,410,487,332.00	2,372,467,608.00	98.42	38,019,724.00	1.58
5.2	BELANJA LANGSUNG	2,252,023,560.00	2,036,530,453.00	90.43	215,493,107.00	9.57
5.2.1	Belanja Pegawai	479,270,000.00	433,228,000.00	90.39	46,042,000.00	9.61
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,677,253,560.00	1,513,283,053.00	90.22	163,970,507.00	9.78
5.1.3	Belanja Modal	95,500,000.00	90,019,400.00	94.26	5,480,600.00	5.74
5.1.4	Jumlah Belanja Langsung	2,252,023,560.00	2,036,530,453.00	90.43	215,493,107.00	9.57
	JUMLAH BELANJA	4,662,510,892.00	4,408,998,061.00	94.56	253,512,831.00	5.44
C	SURPLUS/(DEFISIT)	(4,662,510,892.00)	(4,408,998,061.00)	94.56	(253,512,831.00)	5.44



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

No. Akun	Uraian	31-Des-19	31-Des-18
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas dan Setara Kas		
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan		
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1.1.1.04	Kas di BLUD		
1.1.1.05	Kas Dana Kapitasi JKN		
1.1.3	Piutang Pendapatan		
1.1.3.01	Piutang Pajak		
1.1.3.02	Piutang Retribusi		
1.1.3.03	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.3.03.03	Piutang Bagian Laba atas PM pada Perush.Milik Swasta		
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.3.04.15	Piutang Lainnya-Kend. R-2 Kades		
1.1.3.04.16	Piutang Lainnya-Bunga Dana Bergulir		
1.1.3.04.17	Piutang Lainnya-Denda Dana Bergulir		
1.1.3.04.18	Piutang Lainnya-Klaim Jasa Layanan ke BPJS		
	Piutang Lainnya		
1.1.3.05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
1.1.3.06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		
1.1.3.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
1.1.5	Penyisihan Piutang		
1.1.5.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.5.01.01	Penyisihan Piutang Pajak		
1.1.5.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.5.01.03	Penyisihan Piut. Hasil Pengel.Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.5.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.7	Persediaan	1.702.000,00	1.494.000,00
	Jumlah Aset Lancar	1.702.000,00	1.494.000,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.1.06	Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.1.06.01	Investasi Non Permanen Lainnya		
	Investasi Non Permanen Lainnya		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.2.01	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah		
	Jumlah Investasi Jk.Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah	75.800.000,00	75.800.000,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.030.879.200,00	940.859.800,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	219.637.909,00	219.637.909,00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	900.000,00	900.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya		
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	- Gedung		
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.080.615.875,44)	(976.584.281,28)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(934.345.050,00)	(834.728.714,00)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(148.000.825,44)	(141.608.087,28)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JJJ	(270.000,00)	(247.500,00)
	Jumlah Aset Tetap	246.401.233,56	260.413.427,74
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.4	Aset Lain-lain		
1.5.4.01	Aset lain-lain		
1.5.4.01.01	Aset lain-lain (UYHD PU 2011 belum setor)		
1.5.4.01.02	Aset lain-lain (Rasak Berat)		
1.5.4.01.03	Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)		
1.5.4.01.04	Aset lain-lain (Tanah Sewa)		
1.5.4.01.05	Aset lain-lain (BM Prop.)		
1.5.4.01.06	Aset lain-lain (BM Negara.)		
	Jumlah Aset Lainnya	248.103.233,56	261.907.427,74
	JUMLAH ASET	248.103.233,56	261.907.427,74
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
2.2.4	Pendapatan Diterima Dimuka		
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya		
2.1.6.04	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.744.033,00	1.957.963,00
2.1.6.04.01	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.744.033,00	1.957.963,00
3.	EKUITAS		
3.1	EKUITAS		
3.1.1	Ekuitas		
3.1.1.01	Ekuitas		
3.1.1.01.01	Ekuitas	248.359.200,56	259.949.484,74
	JUMLAH EKUITAS	248.359.200,56	259.949.484,74
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	248.103.233,56	261.907.427,74

1/2 2020


 Payakumbuh, Februari 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENGUNA ANGGARAN
HERMAN AZMAR, AP, M.Si

INFO AKRUAL :

1 PENDAPATAN :

2 BEBAN

3 PIUTANG

4 PERASEDIAAN :

	MISAL :1	
	2019	2018
SISA DI NERACA AWAL	1,494,000.00	1,369,500.00
BEBAN PERSEDIAAN	88,450,780.00	92,460,820.00
BRG YG DSERAH KMASY.	-	-
SISA DI NERACA AKHIR	1,702,000.00	1,494,000.00
BEBAN PERSEDIAAN	88,242,780.00	92,336,320.00

PERSEDIAAN :	2019	2018	Belanja LRA	Beban LO
ATK	1,479,000.00	1,182,000.00	30,874,000.0	30,577,000.0
Kebersihan	48,000.00	52,000.00	6,657,780.00	6,661,780.0
Alat Listrik	175,000.00	260,000.00	5,249,000.00	5,334,000.0
	1,702,000.00			

5 BEBAN PENYUSUTAN

A. PERALATAN DAN MESIN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2016	(834,728,714.00)	12/31/2018
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(934,345,050.00)	12/31/2019
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	(99,616,336.00)	

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2016	(141,608,067.26)	12/31/2018
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(146,000,825.44)	12/31/2019
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	(4,392,758.18)	

C. JIJ

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2016	(247,500.00)	12/31/2018
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(270,000.00)	12/31/2019
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	(22,500.00)	

D. ASET TETAP LAINNYA

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2016		12/31/2018
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN		12/31/2019
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	0	

TOTAL BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP (104,031,594.18) 12/31/2019

Penyusutan Tahun Sebelumnya 105,244,672.18

6 Beban Utang Jk Pendek :

	UJP 2018	UJP 2019	Belanja LRA	Beban LO
Air	100,600.00	186,640.00	1,279,640.00	1,365,680.00
Listrik	666,164.00	727,746.00	9,907,032.00	9,968,614.00
Telpon	1,191,199.00	829,647.00	2,954,203.00	2,592,651.00
	1,957,963.00	1,744,033.00		

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

AKUN	Uraian	2019	2018	Bertambah/ Berkurang	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN				
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
8.1.1	Pajak Daerah-LO	-	-	-	-
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	-	-	-	-
8.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
8.1.4	Lain-lain PAD yang Syah	-	-	-	-
	JUMLAH PAD	-	-	-	-
8.2	PENDAPATAN TRANSFER				
8.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
8.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
8.2.1.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
8.2.1.03	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
8.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
8.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	-	-	-	-
8.2.2.01	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
8.2.2.03	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
8.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
8.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	-	-	-	-
8.2.3.01.01	BH Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
8.2.3.01.02	BH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
8.2.3.01.03	BH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
8.2.3.01.04	BH Pajak Air Permukaan	-	-	-	-
8.2.3.01.05	BH Pajak Rokok	-	-	-	-
8.2.3.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH TRANSFER	-	-	-	-
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
8.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
8.3.2	Pendapatan Dada Darurat	-	-	-	-
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
9	BEBAN	4,422,588,325.18	4,173,192,858.18	249,395,467.00	5.98
9.1	BEBAN OPERASI	4,422,588,325.18	4,173,192,858.18	249,395,467.00	5.98
9.1.1	Beban Pegawai	2,424,845,608.00	2,055,615,859.00	369,229,749.00	17.96
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	1,893,711,123.00	2,012,332,327.00	(118,621,204.00)	(5.89)
	Beban Persediaan	88,242,780.00	75,670,750.00	12,572,030.00	16.61
	Beban Jasa	1,055,159,340.00	1,338,204,775.00	(283,045,435.00)	(21.15)
	Beban Pemeliharaan	6,590,000.00	7,441,000.00	(851,000.00)	-
	Beban Perjalanan Dinas	743,719,003.00	591,015,802.00	152,703,201.00	25.84
9.1.3	Beban Bunga	-	-	-	-
9.1.4	Beban Subsidi	-	-	-	-
9.1.5	Beban Hibah	-	-	-	-
9.1.6	Beban Sosial	-	-	-	-
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	104,031,594.18	105,244,672.18	(1,213,078.00)	(1.15)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
9.1.9	Beban Lain-Lain	-	-	-	-
9.2	BEBAN TRANSFER	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN	4,422,588,325.18	4,173,192,858.18	249,395,467.00	5.98
	SURPLUS/ (DEFISIT)-LO	(4,422,588,325.18)	(4,173,192,858.18)	(249,395,467.00)	5.98

Payakumbuh, Februari 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PENGUNA ANGGARAN
HERMAN AZMAR AP, M.Si
NIP. 19730813 199311 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

AKUN	Uraian	2019	2018	Bertambah/ Berkurang	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN				
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
8.1.1	Pajak Daerah-LO				
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO				
8.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
8.1.4	Lain-lain PAD yang Syah				
	JUMLAH PAD				
	JUMLAH PENDAPATAN				
9	BEBAN	4,422,588,325.18	4,173,192,858.18	249,395,467.00	5.98
9.1	BEBAN OPERASI	4,422,588,325.18	4,173,192,858.18	249,395,467.00	5.98
9.1.1	Beban Pegawai	2,424,845,608.00	2,055,615,859.00	369,229,749.00	17.96
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	1,893,711,123.00	2,012,332,327.00	(118,621,204.00)	(5.89)
9.1.3	Beban Bunga				
9.1.4	Beban Subsidi				
9.1.5	Beban Hibah				
9.1.6	Beban Sosial				
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	104,031,594.18	105,244,672.18	(1,213,078.00)	(1.15)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang				
9.1.9	Beban Lain-Lain				
9.2	BEBAN TRANSFER				
	JUMLAH BEBAN	4,422,588,325.18	4,173,192,858.18	249,395,467.00	5.98
	SURPLUS/ (DEFISIT)-LO	(4,422,588,325.18)	(4,173,192,858.18)	(249,395,467.00)	5.98



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 BADAN KESBANGPOL
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NOMOR	Uraian	2019	2018
1	Ekuitas Awal	259,949,464.74	✓ 353,046,655.92
2	Surplus/defisit - LO	(4,422,588,325.18)	✓ (4,173,192,858.18)
3	RIK PPKD	4,408,998,061.00	✓ 4,080,095,667.00
4	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	-	-
	Koreksi Akm. Penyusutan Pertama kali	-	-
	Koreksi Hutang Tahun Lalu	-	-
	Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat	-	-
	Mutasi Tambah Aset Tetap	-	-
	Mutasi Kurang Aset Lainnya	-	-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan AT-PM Tahun sebelumnya	-	-
	Koreksi Aset Ekstra Comp	-	-
5	Ekuitas Akhir	246,359,200.56	✓ 259,949,464.74
	Neraca 31/12/2019 dan 2018	246,359,200.56	✓ 259,949,464.74

Payakumbuh, Februari 2020
 BADAN KESBANG DAN POLITIK
 PENGUNA ANGGARAN



HERMAN ZMAR, AP, M.Si
 NIP. 19730913 199311 1 001
 LIMA PULUH KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesbangpol

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya, sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan mengenai :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembauran bangsa.
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan bangsa.
- c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokratisasi.
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan wawasan kebangsaan.
- e. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa.
- f. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana serta rumah tangga.
- g. Penegakan dan melindungi hak azazi manusia dan perwujudan demokratisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa, demokratisasi, penanganan masalah aktual.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2019, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2019 Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AKrual Pada Pemerintah Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara menetralsisir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan.
- 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan.
- 1.4 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

II. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro.
- 2.2 Kebijakan Keuangan.
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan.
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Efektivitas Akuntansi.
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Neraca
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu menciptakan situasi dan kondisi yang aman ditengah-tengah masyarakat sehingga pembangunan berjalan dengan lancar serta terdepan dalam kesatuan bangsa dan pembinaan politik.

Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan kegiatan yang ada, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipengaruhi oleh 2 aspek lingkungan yaitu:

a. Lingkungan Eksternal

Yang dimaksud dengan lingkungan eksternal adalah lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

b. Lingkungan Internal

Yang dimaksud dengan lingkungan internal disini adalah seluruh pegawai yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pegawai yang berada pada Dinas/Badan/ Kantor serta Bagian merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh untuk terciptanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan dalam pengelolaan DPA tahun anggaran 2019 meliputi hal berikut :

2.2.1 Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada

masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2019, Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 9 Program yang didukung oleh 30 Kegiatan yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 6) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 7) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 8) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
- 9) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Ke sembilan (9) program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi yang berkisar 94,56 %.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Belanja

Total realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 4.408.998.061,- Jumlah tersebut mencapai 94.56% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 4.662.510.892,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi 2019		Realisasi 2018
	Rp	Rp	%	
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	2.465.607.332,-	2.424.845.608,-	98,35	2.055.615.859,-
Belanja Barang dan Jasa	2.101.403.560,-	1.894.133.053,-	90,14	2.011.929.808,-
Belanja Hibah				
Belanja Sosial				
Jumlah Belanja Operasi	4.567.010.892,-	4.318.978.661,-	94,57	4.067.545.667,-
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	95.500.000,-	90.019.000,-	94,26	66.896.400,-
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja				

Aset Tetap				
Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
JUMLAH BELANJA	4.662.510.892,-	4.408.998.061,-	94,56	4.080.095.667,-
SURPLUS / (DEFISIT)	(4.662.510.892,-)	(4.408.998.061,-)	94,56	(4.080.095.667,-)

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar **Rp.2.465.607.332,-** terealisasi sebesar **Rp.2.424.845.608,-** atau sebesar 98,35%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar **Rp.322.099.272,-** sisa anggaran ini sangat dipengaruhi sisa belanja Tambahan Penghasilan yang sangat besar dikarenakan pengaruh Pemotongan Sanksi.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar **Rp. 2.101.403.560,-** realisasi sebesar **Rp.1.894.133.053,-** atau sebesar 90,14%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar **Rp. 207.270.507,-** disebabkan tidak terealisasinya beberapa belanja barang dan jasa sampai akhir tahun anggaran 2019.

Sedangkan untuk belanja modal terdapat anggaran sebesar **Rp.95.500.000,-** terealisasi sebesar **Rp.90.019.400,-** atau sebesar 94,26%.

3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi pada belanja pegawai, belanja gaji dan tunjangan tidak begitu mempengaruhi sisa anggaran, namun yang sangat mempengaruhi adalah Pendidikan dan Pelatihan formal yaitu Belanja Bimbingan Tehnis dengan anggaran Rp.14.000.000,- dengan realisasi Rp 0,- dimana kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya Pelatihan dari pihak terkait, dan mengakibatkan kelebihan dana tersebut terinci sebagai berikut :

1. Pendidikan dan pelatihan Formal dengan dana 14.000.000,- realisasi 0,- atau sebesar 0 % disebabkan

sebesar 0 % disebabkan karena tidak adanya pelatihan yang diikuti oleh para Karyawan/ti Badan Kesbang Pol Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2019 mengakibatkan adanya kelebihan anggaran.

2. Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur dengan Anggaran Rp 46.884.690,- dengan realisasi Rp 21.215.000,- (45,24 %), disebabkan adanya beberapa belanja pegawai yang bisa ditekan dalam pengeluaran dalam kegiatan tersebut.
3. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan anggaran Rp.28.685.290,- dengan realisasi Rp 13.485.900,- sisa anggaran Rp 15.199.390,- (47,01 %) ini disebabkan adanya beberapa aitem yang bisa di tekan pengeluarannya seperti Perjalanan dinas dan pemakaian Bahan bakar minyak.
4. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan dengan Anggaran Rp 22.206.000,- dengan realisasi Rp 16.407.500,- (73,88 %) dengan sisa sebesar Rp 5.798.500,- sehingga adanya kelebihan anggaran dikarenakan adanya penekanan penghematan dalam pemakaian serta mencetak blanko seperti SPPD, Kop surat dan lainnya sehingga terjadilah kelebihan dana.
5. Penyediaan makanan dan minuman dengan anggran Rp 27.500.000,- dengan realisasi Rp 17.902.000,- (65,09 %) dan sisa Rp 9.595.000,- dikarenakan berkurangnya rapat-rapat yang diadakan oleh Kesbang Pol pada Tahun 2019 ini.
6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp 18.225.000,- dengan realisasi sebesar Rp 9.692.000,- dengan sisa Rp 8.533.000,- (53,18 %) disebabkan adanga biaya pengeluaran yang bisa di tekan dalam pengeluaran kegiatan sosialisasi tersebut seperti Perjalanan Dinas Monitoring dan perjalanan Dinas Sosialisasi.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. penyusunan laporan keuangan tahun 2019, mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2018 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan dan LRA, Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi bendahara.

- Penyajian Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada Neraca berbasis Akrual.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah atau budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.

Mutasi Pos-Pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis Akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional(LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

a. Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya/ nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

d. Tanah

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan Pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan

e. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan dan nilai wajar pada saat asset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

f. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan konstruksi dan biaya lainnya sampai jaringan siap pakai.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

- Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD.

Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi PPK-OPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah dan atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto.

- Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

Timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya Kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik. Terjadinya konsumsi asset saat pengeluaran kas pada pihak lain yang tidak didahului timbulnya dan/atau konsumsi asset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset contohnya penyusutan dan amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadi konsumsi asset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
5	Belanja	4.408.998.061,-	4.080.095.667,-
5.1	Belanja Operasi	4.318.978.661,-	4.067.545.667,-
5.1.1	Belanja Pegawai	2.424.845.608,-	2.055.615.859,-
Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dalam tahun anggaran 2019 dan tahun 2018. Jumlah realisasi belanja pegawai tersebut terinci atas:			
	Gaji dan Tunjangan	1.807.501.854,-	1.071.454.100,-
	Tambahan Penghasilan PNS	564.965.754,-	390.474.666,-
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		0,-
	Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa		0,-
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan		0,-
	Honorarium PPTK/Pembantu PPTK		0,-
	Honor Bendara, Pembantu Bendahara		0,-
	Uang Lembur	52.378.000,-	20.346.000,-
	Honorarium Tim Pengadaan Barang		0,-
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang		0,-
	Honor MC		0,-
	Honor Pembaca Al-Quran/Doa		0,-
	Pemimpin Lagu		0,-
	Honor Juri		0,-
	Honor Moderator		0,-
	Uang Yang diberikan kepada pihak masyarakat		0,-
	Honor Buruh/Mekanik		0,-
	Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber		0,-
	Honorarium Pegawai Honor		0,-
	TOTAL BELANJA PEGAWAI	2.424.845.608,-	2.055.615.859,-

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa **1.894.133.053,- 2.011.929.808,-**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Badan Kesbangpol Tahun 2019 dan 2018, dimana realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 mencapai 90,14% dari anggaran yang ditetapkan

Rincian belanja barang dan jasa terinci sbb:

Belanja Bahan Pakai Habis	83.003.780,-	70.228.250,-
Belanja Bahan/ Material	3.660.000,-	5.567.000,-
Belanja Jasa Kantor	108.644.678,-	157.738.094,-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	137.336.402,-	106.262.962,-
Belanja Cetak Penggandaan	34.587.500,-	45.261.700,-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/parkir	0,-	3.000.000,-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.800.000,-	22.700.000,-

Belanja Makan Minum	80.679.500,-	100.735.000,-
Belanja Pakaian Kerja	16.500.500,-	
Belanja Pakaian Dinas Harian		
Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	34.150.000,-	0,-
Belanja Pakaian Olah Raga		
Belanja Perjalanan Dinas	743.719.003,-	591.015.802,-
Belanja Sosialisasi	186.261.900,-	0,-
Belanja Pemeliharaan	6.590.000,-	7.441.000,-
Honorarium PNS	352.900.000,-	831.575.000,-
Honorarium Non PNS	32.100.000,-	63.605.000,-
TOTAL BELANJA BARANG DAN JASA	1.894.133.053,-	2.011.929.808,-

5.2 Belanja Modal **90.019.400,-** **12.550.000,-**

Dana Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019 diperuntukkan pada pembelian Peralatan dan Mesin yang dianggarkan sejumlah Rp.95.500.000,- dan terealisasi sebanyak Rp.90.019.400,- atau 94.26%.

5.2.1 Belanja Modal peralatan dan Mesin

Merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2019 dan 2018 dengan rincian sbb:

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur		
Belanja Modal Pengadaan ALat Studio	11.000.000,-	4.500.000,-
Belanja Modal Pengadaan Komputer (Leptop)	55.619.400,-	5.200.000,-
Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi kerja/Rapat Pejabat	7.000.000,-	0,-
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	0,-	0,-
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.400.000,-	2.850.000,-
Belanja Modal Pengadaan meubeleur		
Belanja Modal Pengadaan Relatan Dapur		
TOTAL BELANJA MODAL	90.019.400,-	12.550.000,-

TOTAL BELANJA **4.408.998.061,-** **4.080.095.667,-**

5.2.1.NERACA

No	Perkiraan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	ASET		
I.1	ASET LANCAR		
1.	Kas di Bend. Pengeluaran	Rp. 0,-	Rp. 0,-
2.	Persediaan	Rp. 1.702.000,-	Rp. 1.494.000,-
	Pada awal Januari 2020 terdapat sisa alat tulis kantor berupa kertas HVS, Map Kesbang, Kop Kesbang, kwitansi, blangko SPPD, tinta dan beberapa alat listrik dan kebersihan yang belum digunakan sampai akhir 31 Desember 2019, rincian terlampir.		
1.3	ASET TETAP		
1.	Tanah	Rp. 75.600.000,-	Rp. 75.600.000,-
	Tanah yang ditempati Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan tanah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dimutasikan (Mutasi Tambah) menjadi tanah yang dikuasai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2015.		
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 1.030.879.200,-	Rp. 940.859.800,-
	Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh Badan Kesbangpol Pada tahun 2019 dan 2018. terdapat penambahan nilai aset peralatan dan mesin dengan rincian:		
	Mutasi Penambahan :		
	- Belanja Modal Tahun 2019	90.019.400,-	12.550.000,-
	- Belanja barang/jasa komputabel	0,-	0,-
	Total Penambahan	90.019.400,-	12.550.000,-
	Mutai Pengurangan :		
	- Penghapusan Aset	0,-	0,-
	- Belanja modal tidak dikapitalisir	0,-	0,-
	Nilai awal peralatan dan mesin	Rp. 1.030.879.200,-	Rp. 940.859.800,-
	Penambahan	Rp. 90.019.400,-	Rp. 12.550.000,-
	Pengurangan	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	Jadi total aset yang dimiliki oleh Badan kesbangpol per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah	Rp. 1.030.879.200,-	Rp. 940.859.800,-

Belanja Modal senilai Rp 90.019.400,-

Jumlah tersebut realisasi dan anggaran Belanja Modal dalam tahun 2019 dengan Realisasi sebesar 94.26 %, terdiri dari :

1. Belanja Modal Pengadaan Kantor	Rp 16.400.000,-
2. Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp 55.619.400,-
3. Belanja Modal Meja dan kursi kerja	<u>Rp 7.000.000,-</u>
4. Belanja Modal Pengadaan Alat studio	<u>Rp 11.000.000,-</u>
Jumlah	Rp90.019.400,-

Aset Extra Contable

Terdiri dari sbb :

_ Lemari Besi	Rp 750.000,-
_ Jam Dinding Mushala	Rp 100.000,-
_ Penghias Ruangan	Rp 130.000,-
_ Penghias Ruangan(asbak)	Rp 157.400,-
_ Kipas Angin	Rp 750.000,-
_ Accesories Kantor (bunga)	Rp 320.000,-
_ Bunga Meja	<u>Rp 490.000,-</u>
Jumlah	Rp 2.697.400,-

3. Gedung dan Bangunan Rp. 219.637.909,- Rp. 219.637.909,-

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai Badan Kesbangpol Per 31 Desember 2019. Jumlah ini merupakan mutasi asset dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berupa Gedung perkantoran beserta pelataran parkir.

4. Jalan Irigasi dan Jaringan Rp. 900.000,- Rp 900.000,-

Jumlah tersebut merupakan jaringan listrik yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan mutasi dari Sekretariat Daerah.

5. Penyusutan Aset Tetap Rp.(1.080.615.875,44) Rp.(976.584.281,26)

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan asset tetap yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per tanggal 31 Desember 2019.

AKumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin(934.345.050,00)	(834.728.714,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (146.000.825,44)	(141.608.067,26)
Akumulasi Penyusutan JIJ (270.000,00)	(247.500,00)

5.2.2 KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

II. KEWAJIBAN

2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga	Rp	0,-	Rp.	0,-
2.1.6 Utang jangka Pendek	Rp. 1.744.033,-		Rp.1.957.963,-	
Air	Rp. 186.640,-		Rp. 100.600,-	
Listrik	Rp. 727.746,-		Rp. 666.164,-	
Telepon	Rp.829.647,-		Rp.1.191.199,-	

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang jangka pendek yaitu pembayaran rekening telepon, air, listrik dan Fax posisi 31 Desember 2019 dan pembayarannya dilakukan bulan Januari 2020.

III. EKUITAS

Rp.246.359.200,56, Rp 259.949.465

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pada posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp.246.359.200,56 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 259.949.465,-

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2016. Jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut:

	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
BEBAN	Rp.4.422.588.325,18-	Rp. 4.173.192.858,18,-

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dan kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2019 dan tahun 2018 jumlah beban-LO tersebut terinci sebagai berikut:

9.1 BEBAN OPERASI

9.1.1 BEBAN PEGAWAI-LO **Rp.2.424.845.608,- Rp.2.055.615.859,-**

Beban pegawai dapat dirinci sbb:

Beban Gaji dan Tunjangan -LO Rp.1.807.501.854,- Rp.1.644.795.193,-

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi-LO Rp. 1.155.809.800,- Rp.1.071.454.100,-

Tunjangan Keluarga-LO Rp. 105.237.165,- Rp. 95.129.098,-

Tunjangan Jabatan-LO Rp. 115.760.000,- Rp. 105.795.000,-

Tunjangan Fungsional Umum-LO Rp. 30.840.000,- Rp. 30.980.000,-

Tunjangan Beras-LO Rp. 64.453.800,- Rp. 63.150.240,-

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO Rp. 2.080.074,- Rp. 1.182.507,-

Beban Tambahan Penghasilan PNS Rp. 564.968.754,- Rp. 390.474.666,-

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Rp.564.968.754,- Rp. 390.474.666,-

Beban Kerja

Uang Lembur Rp. 52.378.000,- Rp. 20.346.000,-

Uang Lembur PNS-LO Rp. 45.044.000,- Rp. 18.465.000,-

Uang Lembur Non PNS-LO Rp. 7.334.000,- Rp. 1.881.000,-

1. BEBAN PERSEDIAAN Rp.88.242.780,- Rp. 75.670.750,-

Jumlah ini merupakan realisasi beban persediaan dalam tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Sisa persediaan di Neraca Awal Tahun Anggaran 2020 : Rp.1.702.000,- Rp.1.494.000,-

Beban Persediaan : Rp.88.242.780,- Rp.75.795.250,-

Sisa Persediaan di Neraca Akhir Tahun Anggaran 2019: Rp. 1.702.000,-Rp. 1.494.000,-

Beban Persediaan :Rp.88.242.780,- Rp.75.670.750,-

Beban Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Beban Bahan Habis Pakai	Rp. 82.795.780,-	Rp. 70.103.750,-
Beban Alat Tulis Kantor-LO	Rp.30.577.000,-	Rp. 24.851.250,-
Beban Alat Listrik dan Elektronik-LO	Rp. 5.334.000,-	Rp. 2.896.000,-
Beban Perangko, Materai dan Benda Pos-LO	Rp. 3.660.000,-	Rp. 3.222.000,-
Beban Peralatan kebersihan & Bahan Pembersih-LO	Rp. 6.661.780,-	Rp. 6.914.050,-
Beban Perltn/Perlngk Kantor-LO	Rp 2.148.000,-	Rp. 1.250.000,-
Beban Bahan Dokumentasi-LO	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Beban Belanja Alat Tulis/ Seminar Kit Peserta-LO	Rp. 0,-	Rp. 9.630.000,-
Belanja Penghargaan (Tropy,tabanas dan Plakat-LO	Rp 14.550.000,-	Rp. 14.400.000,-
Beban Belanja Spanduk,Bendera, Marawa-LO	Rp. 11.565.000,-	Rp. 9.940.000,-
Beban Persediaan Bahan/Material-LO	Rp. 4.997.000,-	Rp. 16.210.000,-
Beban Bahan Dokumentasi -LO	Rp. 450.000,-	Rp. 850.000,-
Beban Bahan Baku Bangunan-LO	Rp. 0,-	Rp. 4.717.000,-
9.1.2 BEBAN BARANG DAN JASA	Rp.1.055.373.270,-	Rp.1.337.677.756,-
Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:		
Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2019:	Rp.1.055.373.270,-	Rp.1.337.677.756,-
Jumlah Beban Jasa yang Timbul pada awal Tahun 2019:	<u>Rp.1.702.000,-</u>	<u>Rp. 1.957.963,-</u>
Total Beban Jasa Keseluruhan Adalah :	Rp.1.057.075.270,-	Rp.1.339.635.719,-
Beban Jasa Kantor terdiri dari:		
9.1.3 BEBAN JASA KANTOR	Rp. 30.648.678,-	Rp.75.338.094,-
Beban Jasa Telepon-LO	Rp. 2.954.203,-	Rp. 3.341.356,-
Beban Jasa Air-LO	Rp. 1.279.640,-	Rp. 686.690,-
Beban Jasa Listrik-LO	Rp. 9.907.032,-	Rp. 7.940.142,-
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah-LO	Rp. 3.320.000,-	Rp. 2.970.000,-
]Belanja Jasa Kawat/Faximili/Internet-LO	Rp. 9.048.803,-	Rp. 6.639.906,-
Belanja Jasa Sertifikat-LO	Rp. 0,-	Rp. 1.960.000,-
Beban Jasa Penggantian Transport-LO	Rp. 4.175.000,-	Rp. 51.800.000,-
BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	Rp. 137.336.402,-	Rp.106.262.962,-
Beban Jasa Servis-LO	Rp. 3.569.000,-	Rp. 4.500.000,-
Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO	Rp. 23.702.920,-	Rp. 20.248.000,-
Beban Belanja Bahan Bakar	Rp. 106.354.682,-	Rp. 78.268.612,-

Bermotor-LO

BEBAN Cetak DAN	Rp. 34.587.500,-	Rp. 45.261.700,-
PENGGANDAAN		
Beban Belanja Cetak-LO	Rp. 26.831.000,-	Rp. 23.961.000,-
Beban Belanja Penggandaan-LO	Rp. 7.756.500,-	Rp. 21.300.700,-
BEBAN Sewa	Rp.3.600.000,-	Rp. 3.600.000,-
RUMAH/GEDUNG/PARKIR		
Beban Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat-LO	Rp. 0,-	Rp. 3.600.000,-
BEBAN Sewa PERLENGKAPAN	Rp. 37.800.000,-	Rp. 22.700.000,-
PERALATAN KANTOR		
Beban Belanja Sewa Tenda	Rp. 32.900.000,-	Rp. 17.500.000,-
Beban Belanja Sound System	Rp. 4.900.000,-	Rp. 5.200.000,-
BEBAN MAKAN DAN MINUM	Rp 80.679.500,-	Rp.100.735.000,-
Belanja Makanan dan Minum Harian Pegawai-LO		
Belanja Makan dan Minum Rapat-LO	Rp. 34.487.500,-	Rp. 33.192.500,-
Beban Belanja Makan dan Minum Tamu-LO	Rp. 30.247.000,-	Rp. 22.335.000,-
Beban Belanja Makan dan Minum Peserta Pelatihan-LO	Rp. 15.945.500,-	Rp. 45.207.500,-
BEBAN PAKAIAN DINAS DAN	Rp. 16.500.000,-	Rp. 0,-
ATRIBUTNYA		
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO	Rp 16.500.000,-	Rp 0,-
BEBAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	Rp 34.150.000,-	Rp. 0,-
Beban Belanja Pakaian Adat Daerah-LO	Rp. 7.500.000,-	Rp. 0,-
Beban Belanja Pakaian Lapangan	Rp 26.650.000,-	Rp. 0,-
HONORARIUM NON PNS	Rp.110.060.000,-	Rp.124.980.000,-
Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Buruh/Mekanik/Mandor-LO	Rp. 3.120.000,-	Rp. 11.150.000,-
Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap-LO	Rp. 27.950.000,-	Rp. 27.950.000,-
Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO	Rp. 0,-	Rp. 1.050.000,-
Beban Honorarium Moderator-LO	Rp. 0,-	Rp. 6.200.000,-
Beban Honorarium MC/Pembawa Acara-LO	Rp. 800.000,-	Rp. 1.850.000,-

Beban Honorarium Pembaca Do'a/Pembaca Alqur'an-LO	Rp. 500.000,-	Rp. 2.670.000,-
Beban Honorarium Pemimpin Lagu-LO	Rp. 150.000,-	Rp. 1.210.000,-
Beban Honorarium Juri/Penilai/Pembina-LO	Rp. 2.700.000,-	Rp. 2.700.000,-
Beban Jasa Pegawai Harian Lepas-LO	Rp. 74.040.000,-	Rp. 69.900.000,-
Beban Jasa Informasi/promosi/Peliputan Media.	Rp. 0,-	Rp. 300.000,-
HONORARIUM PNS	Rp. 573.575.190,-	Rp.858.800.000,-
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-LO	Rp. 239.850.000,-	Rp. 725.900.000,-
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber -LO	Rp. 3.000.000,-	Rp. 27.225.000,-
Beban Honorarium PA-KPA-LO	Rp. 17.400.000,-	Rp. 12.600.000,-
Beban Honorarium PPK dan Pembantu PPK	Rp. 6.600.000,-	Rp. 6.600.000,-
Beban Honorarium PPTK dan Pembantu PPTK	Rp. 62.700.000,-	Rp. 63.975.000,-
Beban Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	Rp. 20.750.000,-	Rp. 22.500.000,-
Beban Belanja Sosialisasi-LO	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator-LO	Rp. 0,-	Rp. 0,-
BEBAN PEMELIHARAAN	Rp. 6.590.000,-	Rp. 7.441.000,-
Beban Belanja Pemeliharaan Gedung/Ruangan/Dinding-LO	Rp. 6.590.000,-	Rp. 7.441.000,-
Beban Belanja Pemeliharaan Atap/Loteng-LO	Rp. 0,-	0,-
BEBAN PERJALANAN DINAS	Rp.743.719.003,-	Rp. 591.015.802,-
Beban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah-LO	Rp. 153.830.000,-	Rp. 106.815.000,-
Beban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah-LO	Rp. 589.889.003,-	Rp. 484.200.802,-
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	(Rp101.250.624,44)	(Rp.105.244.672,18)

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
EKUITAS AWAL	Rp 259.949.465	Rp.353.046.655,92
Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp. 259.949.465,- dan Rp. 353.046.655,92,- yang terdiri dari:		
1. Jumlah Aset Lancar :	Rp. 1.702.000,00	Rp. 1.494.000,00
2. Jumlah Aset Tetap	:Rp.249.182.203,56	<u>RP.260.413.427,74</u>
	Rp.250.884.203,56	Rp.261.907.427,74
Dikurangi :		
3. Jumlah Kewajiban :	Rp.1.744.033,00	Rp. 1.957.963,00

Maka Total Ekuitas Awal **Rp. 259.949.465,00** **Rp. 353.046.655,92**

SURPLUS/DEFISIT-LO Rp.(4.385.921.735,44) Rp.(4.173.192.858,18)

Surplus/Defisit -LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban LO per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar (Rp.4.385.921.921,44) dan Rp. 4.173.192.858,18)

R/K PPKD Rp.4.408.998.061,00 Rp. 4.080.095.667,00

R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran atau merupakan total seluruh belanja yaitu: Rp. 4.408.998.061,00 dan 4.080.095.667,00,-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur Penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui sekretariat Daerah.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan peraturan Daerah Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Kepala Badan
- Sekretaris
- Subbag Pelaporan dan Program
- Subbag Umum dan Kepegawaian
- Subbag Keuangan
- Kabid Politik Dalam Negeri
- Subbid Fasilitasi Parpol & Ormas
- Subbid HAL & Fasilitasi Pemilu
- Kabid Ideologi dan Wasbang
- Subbid Bina Ideologi
- Subbid Wasbang
- Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat
- Subbid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini
- Subbid Ketahanan Ekonomi, Sosbud

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari , Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.4.080.998.061,-** Jumlah tersebut mencapai 94,56% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar **Rp. 4.662.510.892,-** dengan rincian sebagai berikut :

Nama Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.465.607.332,-	2.424.845.608,-	98,35
Belanja Barang dan Jasa	2.101.403.560,-	1.894.133.053,-	90,14
Belanja Modal	95.500.000,-	90.019.400,-	94,26
Jumlah	4.662.510.892,-	4.408.998.061,-	94,56

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan, walaupun ada Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah, Makan minum Kantor dan Perjalanan Dinas Monitoring dan sosialisasi yang tidak tercapai target disebabkan adanya beberapa aitem yang dapat ditekan pengeluarannya dalam rangka penghematan dalam pelaksanaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.